

STRATEGI MENGATASI KESALAHAN PENGINPUTAN KODE BARANG DALAM APLIKASI PERSEDIAAN DAN PENYUSUNAN PENCATATAN BIAYA OPERASIONAL

Putu Ayu Meidha Suwandewi^{1,*}, Ni Kadek Ita Krisna Juniari²

^{1,2}Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, 80233, Indonesia

*Email: ayumeidha@unmas.ac.id

ABSTRAK

Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Bali lingkup kerjanya adalah melakukan penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional yang berada di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, Klungkung, dan Buleleng. Dalam menjalankan tugasnya wilayah kerja Satker dibagi menjadi tiga area yang masing-masing dipimpin oleh seorang PPK yaitu PPK 3.1, PPK 3.2, dan PPK 3.3. PPK 3.3 sedang menangani proyek Pembangunan jalan dan jembatan Bts. Kota Singaraja titik 7D dan 7E. Pengawai dibagian keuangan mengalami kendala yang pertama salahnya memasukan kode klasifikasi barang persediaan dan kendala yang kedua Permasalah kedua adalah Anggaran tahunan yang diberikan tidak sesuai dengan keperluan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kesalahan penginputan kode barang dalam aplikasi persediaan dan mencengah agar tidak terjadinya kekurangan dana dalam waktu setahun.

Kata Kunci: PPK, Persediaan, Penyusunan

ANALISIS SITUASI

Kementerian Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Bali lingkup kerjanya adalah melakukan penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional yang berada di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, Klungkung, dan Buleleng. Penyelenggaraan Jalan Nasional ini meliputi pemeliharaan berkala Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan, Peningkatan Struktur Jalan pada masa sekarang ini. Iklim reformasi menuntut satker untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola organisasi satker. Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Satker Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Bali dibuat untuk menjawab tuntutan transparansi dan akuntabilitas baik untuk auditor maupun

masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya wilayah kerja Satker dibagi menjadi tiga area yang masing-masing dipimpin oleh seorang PPK yaitu PPK 3.1 Provinsi Bali menangani proyek di wilayah Sp. Kediri - Bts. Kota Singaraja, Mengwitani - Dalam Kota Denpasar, PPK 3.2 Provinsi Bali menangani proyek di wilayah Sp. Cokroamonoto - Kosamba, Sp. Tohpati - Nusa Dua, Jimbaran - Uluwatu, dan PPK 3.3 Provinsi Bali menangani proyek di wilayah Bts. Kota Singaraja – Mengwitani.

PPK 3.3 Provinsi Bali mempunyai pengawai sebanyak 14 dengan kinerja yang baik, untuk dibagian pengawas lapangan sejumlah 5 pengawai, dibagian kantor sejumlah 9 pengawai dan sedang menangani proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Bts. Kota Singaraja - Mengwitani titik 7D dan 7E dengan nilai kontrak Rp. 82.090.682.000,00 dari sumber dana SBSN Tahun Anggaran 2023 – 2024. Pengawai di bagian penata keuangan dan pengelola keuangan terdapat 3 orang pengawai dengan mengalami kendala yang pertama salahnya memasukan kode klasifikasi barang persediaan, seperti dimana seharusnya kode 1010302001000002 untuk barang kertas HVS kwarto 70gr A4 sidu jika kode salah dimasukan satu angka diakhir saja maka akan merubah barang yang akan diinput dan kendala yg kedua Permasalahan kedua adalah Anggaran tahunan yang diberikan tidak sesuai dengan keperluan yang diperlukan di kantor dikarenakan kebutuhan operasional seperti alat tulis kantor (ATK), alat rumah tangga (ART), tinta, dan lain sebagainya sewaktu-waktu harga pasti akan meningkat.

PERUMUSAN MASALAH

Selama dilakukan observasi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan pada PPK 3.3 Provinsi Bali sebagai berikut :

1. Kode klasifikasi barang tidak sesuai dengan barang yang kita input dalam aplikasi persediaan
2. Anggaran tahunan yang diberikan tidak sesuai dengan keperluan yang diperlukan di kantor

SOLUSI YANG DIBERIKAN

Solusi yang dapat diberikan dari permasalahan – permasalahan tersebut dilaksanakan dengan cara :

1. Bersurat untuk mengubah kode barang yang awalnya salah menjadi benar, setelah bersurat ke pusat Kementerian untuk mengubah kode barang yang salah. Selanjutnya kita bisa mendetailkan kembali kode barang yang telah diinput oleh pusat.
2. Menyiapkan dan menyusun rencana penyerapan tahunan dan bulanan, serta menjalankan anggaran tahunan dan bulanan agar sesuai dengan rencana awal yang dibuat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul Strategi Mengatasi Kesalahan Penginputan Kode Barang Dalam Aplikasi Persediaan Dan Penyusunan Pencatatan Biaya Operasional, berlangsung dari tanggal 18 Maret 2024 sampai 2 Mei 2024. Dalam pelaksanaan program Kegiatan Pengabdian Masyarakat, program kerja yang telah direncanakan untuk seluruh bidang dilakukan di Perusahaan sesuai dengan program kerja dan waktu pelaksanaan yang telah dibuat.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ketercapaian Kegiatan

Pemahaman pentingnya mengetahui bagaimana cara mengatasi salah input kode barang dalam aplikasi persediaan dan pentingnya menyusun rencana tahunan dan bulanan telah berhasil dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi. Ketercapaian program kerja yang pertama yaitu melakukan kegiatan bersurat untuk mengubah kode barang yang awalnya salah menjadi benar dan melakukan kegiatan pendetailan kembali kode barang yang telah diinput oleh pusat. Realisasi dalam program ini adalah 100%. Pada program kedua, yaitu melakukan persiapan dan penyusunan rencana penyerapan tahunan dan bulanan, menjalankan anggaran tahunan dan Tim Pengabdian kepada Masyarakat mampu mengelola proses interview dari kandidat hingga diterima menjadi trainee bulanan agar sesuai dengan rencana awal yang dibuat. Supaya tidak terjadi kekurangan dana dalam waktu setahun.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil dilaksanakan. Adapun faktor pendukung keberhasilan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:

1. Kepala Urusan Tata Usaha PPK 3.3 yang mendukung penuh kegiatan ini.
2. Tersedianya fasilitas yang memadai seperti komputer, dan ruangan yang membuat nyaman dalam melakukan penelitian.

Sedangkan faktor penghambat Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu karena mobilitas kerja pegawai yang cukup tinggi dan masing-masing pegawai memiliki tugas masing – masing dan banyaknya cuti idul fitri.

a. Partisipasi Pegawai

a. Partisipasi Pegawai

Partisipasi pegawai baik dalam kegiatan strategi mengatasi kesalahan penginputan kode barang dalam aplikasi persediaan dan penyusunan pencatatan biaya operasional, sangat antusias, terlihat dari kehadiran dan tingkat kemauan pegawai dalam pelaksanaan kegiatan.



b. Partisipasi Pimpinan

Partisipasi pimpinan Kepala Urusan Tata Usaha

PPK 3.3 dapat dilihat dari diizinkannya pelaksanaan program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk dilaksanakan ditempat instansinya dan dimudahkan dalam pemberitaan data yang diperlukan.



SIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada PPK 3.3 Provinsi Bali yaitu :

1. Pentingnya mengetahui bagaimana cara mengatasi salah input kode barang dalam aplikasi persediaan yang telah diberikan pimpinan untuk melaksanakan tugas sudah terlaksana dengan baik.
2. Pentingnya menyusun rencana tahunan dan bulanan agar tidak terjadinya kekurangan dana dalam waktu setahun telah dilaksanakan dengan baik.

Saran yang dapat diberikan setelah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada PPK 3.3 Provinsi Bali adalah diharapkan para pegawai kedepannya dapat melanjutkan solusi dalam bentuk program-program tersebut agar kendala-kendala seperti ini dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Sabrina, R. (2023). Buku Reference-Peranan Manajemen SDM dalam Organisasi. *Aksaqila Jabfung*.